

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Hakim, 2006, *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah di Era Demokrasi Langsung*, Yogyakarta, Toga Press bekerjasama dengan UMMU Press.
- Abu Daud Busroh, 1990, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Ady Kusnadi, 2006, *Penelitian Aspek Hukum Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Anonim, 1992, *Menggugat Budaya Jawa Dalam Economica, Mimbar Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Anonim, 2012, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta.
- Baskoro, Haryadi dan Sunaryo, Sudomo, 2011, *Wasiat HB IX: Yogyakarta Kota Republik*, Yogyakarta, Galang Press.
- Dahlan Thaib, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta, Total Media.
- H. A. S Natabaya, 2006, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara Pengembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Heru Wahyukismoyo, 2008 *Merajut Kembali Pemikiran Sultan Hamengkubuwono IX*. Yogyakarta, Dharmakaryadhika Publisher.
- I Dewa Gede Atmadja, 2012, *Ilmu Negara*, Malang, Setara Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Margana S, 2010, *Keraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Moehamad Roem et al, 1982, *Tahta Untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, Gramedia, Jakarta.

- Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ni'matul Huda, 2013, *Hukum Tata Negara*, Yogyakarta, Rajawali Press.
- Paryanto, 2016, "Dinamika Politik Keistimewaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca UU Nomor 13 Tahun 2012"(Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Rafiuddin, 2012, "*Penalaran, Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010)*",(Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Septi Nur Wijayanti, Iwan Satriawan, 2009, *Hukum Tata Negara Teori & Prakteknya di Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Suryo Sakti Hadiwiyono, 2009, *Menggugat Keistimewaan Yogyakarta: Tarik ulur Kepentingan, Konflik Elit dan Isu Perpecahan*, Yogyakarta, Pinus Book Publisher.
- Susilo Harjono, 2011, "Rangkaian Jejak yang Serupa: Studi Pola Suksesi di Keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat" (Skripsi Ilmu Politik dan Pemerintahan tidak diterbitkan, Fakultas Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM).
- _____, 2012, *Kronik Suksesi Keraton Jawa 1755-1989*, Yogyakarta, *Research Centre for Politic and Government* Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan NKRI.
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Kencana.
- Yana Mh, 2010, *Falsafah Dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta, Absolut.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

JURNAL

- Arief Aulia Rachman, “Dinamika Kerukunan Umat Beragama Dalam Kepemimpinan Kesultanan Yogyakarta”, *Akademika*, Vol. 19, No. 01 (Januari -Juni 2014).
- Bayu Dardias, “Menyiapkan Sultan Perempuan : Legitimasi Langit dan Efektivitas Rezim Sultan Hamengku Buwono X”, *Masyarakat Indonesia*, Vol. 42(1) (Juni 2016).
- Dina Putri Pratama, Retno Saraswati, Suparno, “Kajian Tentang Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol. 1, No. 2 (2013).
- Fajar et al, “Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)”, *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretarian Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2011).
- Hinijati Widjaja, “Babak Baru Tradisi Mataram Islam di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat”, *Jurnal Ilmiah WIDYA Non-Eksakta*, 1(1) (2016).
- Ismu Gunadi Widodo, “Sistem Penetapan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Sistem Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945”, Vol. 1, No. 2 (2011).
- Laksmi Kusuma Wardani, “Pengaruh Pandangan Sosio-Kultural Sultan Hamengkubuwana IX terhadap Eksistensi Keraton Yogyakarta”, *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*, Vol. 25, No.1 (2012).
- Mulyanto Ahmad, 2013, “Problematika Pengujian Peraturan Undang-Undang (Judicial Review) Pada Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi”, *Yustisia*, (Januari-April 2013).
- Nora Hilma Sari, “Analisis Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2015).
- Tri Ratnawati, “Antara Otonomi Sultan dan Kepatuhan Pada Pusat di Era Reformasi: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, *Governance*, Vol. 2, No. 1 (November 2011).

Wahyuni Choiriyati, "Suksesi Kepemimpinan Kraton Ngayogyakarta dalam Dualitas Struktur", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 15, No. 1 (Januari - April 2017).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

R.I. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang "Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah".

R.I. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang "Pemerintahan Daerah".

R.I. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang "Pemerintahan Daerah".

R.I. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintahan Daerah".

R.I. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang "Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Aturan peralihan".

R.I., Putusan Mahkamah Kontitisi Nomor 88/PUU-XIV/2016 tentang "Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

R.I., Risalah Sidang Perkara Nomor 88/PUU/XIV/2016 tentang "Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

R.I., Undang-Undang Dasar 1945, Bab VI, Pasal 18 B

R.I., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang "Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah".

R.I., Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang "Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta".

R.I., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang "Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri".

R.I., Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang "Pemerintah Daerah".

MEDIA ELEKTRONIK

Blak-blakan dengan Sultan.(2007). *Kick Andy MetroTV*.

<http://fajar.co.id/2017/08/31/mk-putusan-perempuan-bisa-jadi-gubernur-diy/>

<http://keratonjogja.id/cikal-bakal/detail>

<http://www.umi.ac.id/romo-tirun-ingatkan-warga-yogyakarta-agar-tidak-ewuh-pakewuh-dengan-masalah-keraton.html>

Iwan Satriawan, 2017, *Menanti Langkah Negarawan Istana Yogya*, 9 September 2017, <https://www.koranbernas.id/menanti-langkah-negarawan-istana-yogya>/Selasa/10/10-2017 pkl. 20.00 wib

Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta, *Cikal Bakal Keraton Kesultanan Yogyakarta*, <http://keratonjogja.id/cikal-bakal/detail>, Rabu/13/12/2017 pkl. 15.57